

LK3

Agama & Kemiskinan

Tim penyusun :

Abdani Solihin, Agus Setiyo Utomo, Ani Mariyatun, Azhar Ridhanie,
Erna Kasypiah, Noorhalis Majid, Normadina

ISLAM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Dr. Wardani, M.Ag.¹

Kata “miskin” bermakna orang tidak memiliki harta benda, atau serba kekurangan, karena berpenghasilan rendah. Sedangkan, kata “fakir” bermakna orang yang sangat



¹ Penulis sekarang adalah tenaga administrasi (staf pembantu bidang akademik kemahasiswaan) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin. Meraih gelar doktor di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, alumnus Pendidikan Kader Mufasssir (PKM) di Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) selama enam bulan di Jakarta (2009) dan dua bulan di Cairo (2010), dan pernah mengikuti kursus singkat (*short course*) menulis akademik (*academic writing*) di Universitas Leipzig, Jerman (2010). Memperoleh penghargaan: sebagai wisudawan sarjana (S1) terbaik (1998), wisudawan program magister (S2) terbaik dengan penyelesaian studi tepat waktu, penghargaan “Mitra Pembangunan Banua” dari Gubernur Kalimantan Selatan (2004), award tesis terbaik nasional (2006) dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama, anugerah *Indonesian Scholar Dissertation Award (ISDA)* dari *The Indonesian International Education Foundation (IIEF)* Jakarta (2010), penghargaan direktur Program Pascasarjana, Rektor, dan BTN sebagai wisudawan program doktor (S3) terbaik (2010), dan pernah memenangkan beberapa lomba karya tulis ilmiah. Karyanya, antara lain, adalah “Epistemologi Kalam Abad Pertengahan” (Yogyakarta, LKIS, 2003). Email: mwardanibjm@gmail.com; wardani.anwar@yahoo.co.id.

kekurangan, atau sangat miskin. Standar hidup yang menjadi indikator kemiskinan adalah pendapatan. Jika pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan standar, maka yang bersangkutan disebut miskin. Secara sederhana, kita bisa mengukur kemiskinan dengan mengacu ke standar upah minimum provinsi tahun 2010 (untuk Kalimantan Selatan, Rp1.024.500,- perbulan), sekalipun standar pemerintah dalam upah dan, khususnya, standar minimal pendapatan terendah dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia bisa saja lebih politis, karena dengan menetapkan standar terendah atau malah standar yang tidak jelas, sebagaimana kritik sebagian kalangan, hanya untuk menutupi sejumlah angka orang miskin yang terdata di Indonesia. Ukuran garis kemiskinan nasional adalah besarnya pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori perhari perorang dan untuk memenuhi non-makanan, berupa perumahan, kesehatan, pendidikan, pakaian, transportasi, barang, dan jasa. Standar yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan tentu harus mengalami penyesuaian setiap ada pergeseran tuntutan kebutuhan pokok. Di samping itu, ada standar kemiskinan versi bank

dunia yang tentu juga akan mengalami pergeseran, seperti apakah \$2 perorang perhari mencukupi untuk keperluan pokok.

Dalam al-Qur'an, orang miskin dan orang fakir disebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat, padahal zakat yang dikelola dengan model pengelolaan selama ini hanya bisa meringankan penderitaan kemiskinan sewaktu-waktu saja. Dalam al-Qur'an terdapat anjuran agar umat Islam mencari karunia atau kelebihan dari Allah SWT (QS. al-Jumu'ah:10). Dalam QS. al-Duha:8, dalam konteks pujian terhadap Nabi Muhammad, "Bukankah Allah telah mendapati-mu miskin, kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan?", terdapat anjuran secara implisit agar umat Islam berupaya mencapai kehidupan yang berkecukupan, karena dalam keadaan berkecukupan dalam ayat ini disebut sebagai anugerah dan pujian. Bahkan, Allah SWT mencela orang-orang yang mengharamkan hiasan-hiasan duniawi yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia (QS. al-A'raf:32). Dalam QS. al-Baqarah:268, dinyatakan dalam ungkapan berlawanan, yaitu Allah SWT menjanjikan ampunan dan anugerah, sedangkan setan menjanjikan kekafiran. Begitu juga, dinyatakan bahwa mencari

kelebihan dari Allah SWT atau mencari nafkah tidak dilarang untuk dilakukan selama musim haji (QS.al-Baqarah:198).

Begitu kuatnya penekanan bahwa kemiskinan harus diberantas, sehingga dikenal ungkapan: "Hampir saja kefakiran menjadi kekufuran". Hal itu karena kefakiran atau kemiskinan bisa menjadi penyebab orang tidak bisa berkonsentrasi untuk beribadah, dan pada tingkat kemiskinan yang parah, akan rentan pindah agama karena alasan ekonomi. Bagaimanapun, keberagaman berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi. Islam mengajarkan tidak hanya pemeluknya saleh dari agama, melainkan juga memiliki kekuatan dari segi ekonomi. Di berbagai belahan dunia, umat-umat Islam tampak masih tertinggal. Karena penekanan dalam pemberantasan kemiskinan ini, sumber-sumber agama, seperti sabda Nabi dalam doa beliau, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kalau lah aku di akherat nanti bersama orang-orang miskin" (Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khudri dan al-Thabrani dari 'Ubadah bin al-Shamit) perlu dijelaskan konteks sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Nabi, karena pemahaman tekstual terhadap ungkapan itu

akan bertentangan dengan semangat umum ajaran Islam, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits-hadits Nabi yang lain. Pemahaman tekstual terhadap ungkapan itu akan bertentangan, misalnya, dengan sabda Nabi yang memohon perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari cobaan akibat kemiskinan (al-Bukhari dari 'Aisyah) dan dengan sabda beliau yang memohon agar diberi sikap dengan kehormatan diri dengan tidak menunjukkan keperluan (*'iffah*) dan kekayaan (*ghina*). Beliau juga berkata kepada Sa'd, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkecukupan (kaya) yang bertaqwa dan tidak menonjolkan diri" dan kepada 'Amr bin 'Ash, "Alangkah baik harta yang baik di tangan orang yang baik pula". Menurut Yusuf al-Qaradhawi, yang dimaksud dengan kata "miskin" dalam ungkapan di atas adalah sikap tawadhu' dan rendah hati. Nabi Muhammad SAW sendiri berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kekafiran" (Hadits riwayat Abu Daud). Beliau juga berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan, dan aku berlindung pula dari menganiaya dan dianiaya" (Ibnu Majah dari al-Hakim).

Kemiskinan: Akar dan Pemecahannya

Umat Islam dari segi kuantitas adalah yang terbanyak (mayoritas). Meski demikian, banyak dari umat Islam yang masih jauh dari standar ekonomi, padahal Islam memiliki konsep untuk mengentaskan kemiskinan. Tentu, ada sesuatu yang salah dalam memahami ajaran Islam, mengelola atau *manage* potensi besar umat Islam ini. Akar dan solusi atas problematika kemiskinan pada dasarnya adalah sebagai berikut. **Pertama**, teologi aktivisme. Kita perlu memperbarui berbagai pandangan-pandangan keagamaan Islam yang berimplikasi tidak memiliki visi etos kerja yang baik. Harus diakui bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan prestasi kerja, kreativitas, dan etos kerja. Dengan ungkapan lain, etos kerja yang baik akan melahirkan tingkat ekonomi yang baik pula. Pandangan teologis atau keyakinan yang berorientasi fatalisme harus diperbaharui, karena hanya akan menciptakan angan-angan. Kita memerlukan pandangan teologis yang berbasis aktivis dan progresif, karena hanya dengan itu, umat Islam akan memiliki visi ekonomi yang bagus. Max Weber dalam *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* telah membuktikan bahwa memang ada kaitan

antara pandangan teologis dengan semangat ekonomi. Melalui ajaran Calvin, orang-orang Protestan diajarkan bahwa mereka memiliki kemungkinan sama dalam hal selamat atau celaka. Soal keselamatan ini melahirkan sikap asketisme keduniaan. Ketidakpastian dalam keselamatan tersebut mendorong kalangan Calvinis untuk menabung perolehan kerja mereka dalam bentuk modal. Ada tanggung jawab bagi setiap individu agar hidup di alam ini seakan-akan ia selamat. Kajian ini setidaknya menunjukkan adanya kaitan antara semangat kerja dengan pandangan keagamaan, meskipun semangat kapitalisme tersebut juga berkaitan dengan ketidakpastian teologis. Namun, dalam banyak hal, terutama dalam Islam, etos kerja berkaitan erat dengan “kepastian” teologis, seperti apakah perbuatan diciptakan secara hakiki oleh tuhan atau manusia sendiri, apakah takdir keberuntungan-ketidakberuntungan, termasuk kaya-miskin, seluruhnya atau sebagiannya ditentukan oleh tuhan atau manusia sendiri, apakah manusia adalah agen yang merekayasa masa depannya, dst.

Jawaban teologis terhadap permasalahan ini bukanlah kategori ketat bahwa seseorang yang beretos kerja tinggi harus menjadi seorang

penganut teologi Asy'ariyyah atau Mu'tazilah, karena kedua teologi ini, atau teologi-teologi lain yang berkecenderungan sama, sama-sama memiliki kelemahan. Yang pertama terlalu teosentris, sedangkan kedua terlalu rasionalis-kaku. Sebagai gantinya, pandangan-pandangan teologis, sebagaimana pernah disarankan oleh Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity*, tentang perlunya melakukan rekonstruksi sistematis ilmu-ilmu Islam, seperti teologis, fiqh, dan sufisme, harus dikembalikan kepada uraian-uraian al-Qur'an sendiri tentang keyakinan dan dasar-dasar moralnya. Hal itu karena al-Qur'an memiliki pandangan antropologis yang jelas tentang manusia sebagai makhluk yang diperhadapkan dengan pencipta, serta memiliki uraian yang seimbang tentang ayat-ayat tentang peran tuhan (yang kemudian terlalu ditekankan oleh kalangan fatalis, *jabariyyah*) dan peran manusia (yang kemudian terlalu ditekankan oleh kalangan rasionalis, *qadariyyah*). Idealnya, teologi pekerja, seperti teologi para petani, yang pernah dilontarkan oleh Prof. Dr. M. Zurkani Jahja, dengan bertolak dari ayat seperti "apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian tanam?", tidak hanya menekankan fondasi teologi bagi aktivitas keseharian mereka,

melainkan juga menekankan pandangan aktivisme.

Kedua, fiqh pemberdayaan masyarakat miskin. Fiqh tidak hanya berkaitan dengan pengaturan harta, seperti tampak dalam *Kitab al-Amwal* karya Abu 'Ubayd, melainkan juga memiliki uraian tentang pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain, melalui zakat. Al-Qur'an menegaskan tujuan diwajibkannya zakat adalah "agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang di antara kalian saja". Ajaran Islam tentang pemberian bantuan (filantropi), seperti melalui zakat, perlu dikelola secara profesional. Zakat perlu diarahkan secara maksimal ke arah "memberi kail" ketimbang "memberi makan". Kesadaran ini sebenarnya sudah ada di Indonesia melalui Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Persoalannya adalah apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sejak semula dan secara profesional? Begitu juga, apakah pengelolaannya dipertanggungjawabkan kepada publik pemberi zakat? Apakah sudah tepat sasaran? Di masyarakat kita umumnya, zakat dianggap sebagai ibadah yang dipentingkan di dalamnya semata keselamatan akhirat, sehingga cukup diberikan secara per-

sonal, dan sebagai akibatnya hanya mencapai tujuan minimal (konsumtif, seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa supaya tidak ada orang yang kelaparan pada hari raya ada zakat fitrah). Jika tujuan zakat hanya itu, bagaimana umat Islam yang masih berada di garis kemiskinan yang memerlukan pertolongan harus dibantu di hari-hari lain, sedangkan ajaran Islam yang lain (sedekah) tidak diperhatikan. Pola keberislaman kita selama ini lebih banyak menganut "*akhiratisme*" (cuma mementingkan akhirat) dan pola pikir seperti pepatah Arab "*Telor hari ini lebih baik daripada ayam besok*" (*bidhatul yaum khair min dajajatil ghad*). Pola keberislaman yang keliru seperti inilah yang menyebabkan umat Islam tertinggal dibandingkan umat-umat lain. Minoritas yang dikelola dengan baik akan menjadi lebih berdaya dibanding mayoritas yang tercerai-berai. Nah, jika zakat diarahkan kepada "memberi kail", seperti permodalan, itu lebih memberdayakan umat Islam. Wacana fiqh sudah sering dilontarkan, tidak hanya soal perluasan harta-harta yang wajib dizakati, seperti zakat penghasilan (lihat misalnya Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 142-143), melainkan juga pengelolaannya. Sangat mengherankan bahwa umat Islam yang merupakan mayoritas di tanah air justru rapuh.

Hal itu karena potensi besar ini tidak dikelola dengan manajemen modern. Sebagian umat Islam yang kaya hanya mementingkan dirinya dan mementingkan nasibnya di akherat, sehingga sibuk dengan haji dan umrah yang sudah ditunaikan beberapa kali. Padahal dari 3,6 juta penduduk Kalimantan Selatan, misalnya, di mana mayoritasnya muslim, terdapat para pengusaha yang seandainya bisa mengurangi jumlah haji dan umrah akan menolong saudara-saudaranya sesama muslim yang hidup di kolong-kolong jembatan, menolong pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, dan para orang tuna wisma. Pola keberagamaan yang terlalu akheratisme tersebut disebabkan karena mereka lebih peka pada pahala ritual dibandingkan "pahala" sosial. Umat Islam lebih suka menghabiskan dana untuk *haulan*, misalnya, yang menghabiskan banyak rupiah dibandingkan ibadah sosial.

Ketiga, sufisme baru (neo-sufism). Fazlur Rahman, dalam *Islamic Methodology in History*, mengkritik banyak ajaran sufisme lama yang sebenarnya bertentangan ide-ide moral al-Qur'an yang seharusnya menjadi dasarnya. Menurutnya, banyak ajaran sufisme yang hanya menumbuhkan sifat fasivisme dan fatalisme.

Padahal, ajaran al-Qur'an yang otentik tentang konsep-konsep kunci etika menekankan aktivisme. Oleh karena itu, ajaran-ajaran sufisme lama yang berkecenderungan negasi kehidupan dunia harus dilakukan "rekonstruksi sistematis" dengan cara mengembalikan ide-ide etika keagamaan yang ditafsirkan oleh para sufi secara keliru ke ajaran-ajaran otentik al-Qur'an dengan memahami tujuan moralnya yang prinsipil. Sebagai perbandingan, uraian-uraian Ahmad al-Syarbashi dalam *Mawsu'ah Akhlaq al-Qur'an* (Ensiklopedi Akhlak al-Qur'an) yang terdiri dari enam volume, seperti pandangan al-Qur'an tentang sabar, dengan uraian-uraian sufisme sangat berbeda. Ibn Atha'illah mengartikan sabar sebagai "menerima segala bencana dengan adab yang baik", dan ada pula yang mengartikannya sebagai lebur (*fana'*) dalam bencana tanpa keluhan. Memang, menerima bencana tanpa keluhan bisa dimengerti sebagai ajaran moral al-Qur'an. Akan tetapi, titik-tekan definisi sufi adalah sikap menerima, karena sabar menjadi tahapan menuju tawakkal yang dipahami sebagai sikap pasrah di hadapan tuhan, menghilangkan kehendak pribadi, seperti mayat, atau seperti benda yang hanya bergerak jika digerakkan oleh tuhan sekehendak-Nya. Ada penekanan fasivisme dan

fatalisme dalam ajaran sufisme tersebut. Al-Syarbashi (*Mawsu'ah*, h. 194) mengkritik anggapan bahwa sabar adalah etika penegasian (khuluq salbi) dalam pengertian hanya menekankan menahan penderitaan dengan sikap pasrah, ridha dengan keadaan, tidak mengatasi permasalahan, dan berupaya menghindar dari kesulitan. Sabar, menurutnya, adalah "menahan diri agar tetap sesuai dengan tuntutan agama dan/atau akal rasional". Al-Qur'an (Ali 'Imran:125) pernah menggunakan ungkapan sabar dan takwa yang, menurut sebagian penafsir al-Qur'an, berkaitan perintah Nabi agar pasukan panah bertahan dan menuruti strategi perang beliau ketika perang Uhud. Perang yang berakhir dengan kekalahan bagi kaum muslimin itu adalah karena mereka tidak mau bertahan di pos-pos pertahanan di atas gunung dan tidak menuruti petunjuk Nabi. Sabar dalam konteks ini sama sekali tidak berkonotasi fasif dan fatalis, melainkan bertahan sebagai strategi perang. Predikat sabar pernah dilekatkan pada pasukan kaum muslim yang diperintahkan untuk menghadapi musuh yang jumlahnya sepuluh kali lipat (QS. 8/88:65-66). Dengan demikian, al-Qur'an memiliki struktur etika yang otentik, yang kemudian terdistorsi di tangan para sufi. Muhammad 'Abdullah

Darraz, seorang dosen Universitas al-Azhar, menulis disertasi, *Dustur al-Akhlaq fi al-Qur'an* (Norma Etika dalam al-Qur'an). Al-Qur'an memiliki norma-norma etika (*ethical norms*) yang sifatnya lebih universal yang menjadi "payung" etika baik-buruk di bawahnya. Persoalan ini menjadi penting untuk memahami bahwa al-Qur'an memiliki konsep etika religius yang menekankan aktivisme, bukan fatalisme, sebagaimana dipahami oleh para sufi. Memahami norma etika ini juga menjadi penting dalam konteks memahami ajaran-ajaran al-Qur'an yang spesifik.

Neo-sufisme menjadi penting dalam konteks ini, karena kita perlu membangkitkan semangat umat Islam yang selama ini sebagian dibutakan oleh pandangan sufisme yang fasif dan fatalisme. Orang bisa saja dengan enteng menyatakan bahwa keadaan sekarang yang tidak berkecukupan sudah menjadi kehendak Tuhan (sikap teologis), dan kita harus menerimanya secara pasrah (sikap sufisme fatalis), baik ucapan itu dilontarkan oleh seorang penguasa yang ingin menutupi kebijakan-kebijakan politiknya yang tidak pro rakyat miskin maupun dilontarkan oleh masyarakat miskin sendiri yang mengakui sikap tersebut sebagai

pandangan sufisme. Nama-nama seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Qudamah, Ibn al-Jawzi yang seluruhnya merupakan mata rantai ulama Hanbali, dan al-Ghazali adalah tokoh-tokoh yang menyerukan perlu sufisme yang berorientasi syariat. Inti gerakan revivalisme ini adalah mengembalikan tendensi asketik, fatalisme, dan fasivisme ke syariat yang memuat hukum-hukum formal. Kesalehan religius tidak mungkin dicapai secara sempurna tanpa pemberdayaan ekonomi. Bagaimana para sufi menerapkan perintah al-Qur'an untuk bersedekah, atau berjihad dengan harta, jika mereka tidak memiliki harta? Bagaimana seseorang bisa menyedekahkan harta yang bukan miliknya? Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Fazlur Rahman. Jadi, terdapat pertentangan dalam konsep zuhud yang melucuti semua keinginan dunia dengan anjuran berderma yang juga digaungkan oleh para sufi. Ada baik memperhatikan kehidupan para sufi yang terlihat dari nama-namanya yang sebagian berprofesi sebagai pengusaha. Sufisme perkotaan (*urban sufism*) sekarang menjadi tuntutan. Serban dan jubah bisa digantikan dengan dasi, jas, dan topi. Bukankah kedekatan dengan Tuhan ukurannya adalah kedekatan hati, bukan simbol? Kritik ini hanya ditujukan

kepada sebagian ajaran sufisme lama. Di sisi lain, ada ajaran sufisme yang tidak seperti itu, yang diusung oleh kalangan *Ahl al-Hadits*.

Keempat, optimalisasi peran sosial institusi-institusi Islam. Selama ini, institusi Islam, terlebih institusi pemerintah, lebih cenderung bergerak menurut jalur birokratis, formal, dan cenderung hanya menjadi "pekerja program". Begitu juga, tempat ibadah (masjid dan mushalla) sebaiknya juga tidak difungsikan hanya sebagai tempat shalat, melainkan menjadi pusat pemecahan masalah-masalah umat. Jika kita mengamati arah pembangunan di Kalimantan Selatan, baik di Kota Banjarmasin sendiri maupun di luar Banjarmasin, pembangunan cenderung ke arah pembangunan fisik, seperti mall dan ruko. Kebijakan ini hanya menguntungkan kalangan atas dan para pemilik modal yang menyuburkan kapitalisme, karena pedagang kecil yang merupakan komunitas terbesar menghadapi masalah permodalan. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan tersebut seharusnya diimbangi dengan keberpihakan dengan rakyat kecil dengan menyediakan lembaga-lembaga Islam yang menyediakan kredit permodalan. Di Kalimantan Selatan, saya kira, sudah saatnya dibangun *Islamic Center* (Pusat Islam) seperti

halnya di kota-kota lain di Indonesia. Keberadaan *Islamic Center* (Pusat Islam) berfungsi ganda, seperti: *pertama*, pusat kajian dan informasi tentang Islam di Kalimantan. Mengapa hal ini diperlukan? Karena apa yang disebut kajian Islam kawasan (*area studies*), dalam hal ini Kalimantan, belum tercover secara mendalam dan memadai di perguruan-perguruan tinggi Islam, seperti IAIN dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) baik aspek kepercayaan Islam warna lokal maupun tradisi yang hidup secara sosio-antropologis. Kajian-kajian ini tidak hanya diperlukan dalam konteks kajian Islam Indonesia, tapi juga sebagai informasi yang objektif bagi pengkaji Islam di dunia. *Kedua*, pusat pemberdayaan ekonomi Islam yang secara lengkap dan komprehensif diarahkan kepada penguatan ekonomi umat Islam, tidak hanya di tingkat atas, melainkan juga di tingkat bawah (masyarakat akar rumput). Pusat ini menjadi penyedia fasilitas pendidikan kewirausahaan, pembentukan visi ekonomi Islam, penyerapan modal dan memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil, kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi lain, melakukan riset dalam bidang ekonomi Islam, seminar, implementasi konsep, dll. Khusus tentang pengkreditan modal, selama ini sangat diperlukan lembaga Is-

lam yang benar-benar berpihak kepada rakyat dengan cara (prosedur, angsuran, dll.) yang mudah dan terjangkau, bukan pinjaman yang justeru menyulitkan rakyat kecil. Jadi, dengan model penanganan yang komprehensif terhadap problem-problem umat (ibadah ritual, pendidikan, seminar dan workshop, pembinaan ekonomi kerakyatan, pusat informasi dan dokumentasi, dan penelitian), *Islamic Center* idealnya dirancang menawarkan pemberdayaan umat di semua tingkatan. Jika masyarakat berjubel-jubel memadati ke mall-mall untuk berwisata-belanja dan itu artinya mereka mengeluarkan uang yang menguntungkan "raksasa" ekonomi di negeri ini yang sudah kuat, *Islamic Center* juga idealnya dirancangkan dengan model mall, di mana orang bisa menikmati kenyamanan transaksi seperti halnya berwisata. Bedanya, jika mereka ke mall hanya untuk menghabiskan uang, kini di "mall" *Islamic Center* mereka justru bertransaksi untuk membangun wirausaha-wirausaha yang bisa menghasilkan uang. Di samping itu, mereka tidak hanya disuguhkan berbagai macam bimbingan dan peluang usaha, tapi mereka juga dicerdaskan dengan pengetahuan agama dan umum. Semuanya dirancang menarik sebagai konsep "wisata", sehingga menyenangkan dan menda-

pat hal-hal yang positif secara tidak terasa. *Ketiga*, pusat kebudayaan Islam, termasuk di dalamnya pengembangan seni Islam warna lokal. Ini juga memiliki nilai jual tersendiri di bidang pariwisata di Kalimantan Selatan. Seni-seni lokal yang tumbuh di masyarakat, seperti *madihin*, *bapantun*, dan *panting* yang memiliki pesan moral melalui pusat kebudayaan Islam ini bisa "diadopsi dan diadaftasi" serta diharmonisasikan dengan seni-seni "Islam" yang tumbuh global. Nah, fungsi terpenting di antara tiga fungsi penting *Islamic Center* (Pusat Islam) tersebut adalah fungsinya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi Islam, karena jika ekonomi Islam telah menjadi kuat, maka aspek-aspek lain bisa dibangun dengan sendirinya. Di era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah bisa menangani proyek sosial-kemanusiaan sekaligus secara ekonomis menjanjikan jika dikelola dengan baik. Tiga fungsi (ekonomi, pengetahuan, dan budaya) yang ditopang oleh penguasaan teknologi menjadikan umat Islam akan berdaya. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan (*power*), sedangkan budaya adalah identitas.

Kelima, problem budaya. Harus kita akui bahwa kemiskinan bukan semata persoalan struktural (seperti kebijakan pemerintahan),

melainkan penyebab pentingnya mengendap dalam semangat atau etos dan budaya kerja masyarakat; bagaimana mereka memandang kerja dan pola kerja mereka sehari-hari. Ada beberapa contoh kasus yang menggambarkan kemiskinan bukan sebagai problem struktural, melainkan kultural (budaya). Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan bisa terhenti karena problem kultural. Masyarakat yang kehilangan etos kerja adalah seperti orang yang sedang tertidur nyenyak; tidak sadar dengan ketertinggalannya. Kemiskinan ekonomi akibat "kemiskinan kultural" ini bisa diatasi dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama. Pernah ditemukan fakta bahwa penduduk Desa menjual alat-alat pertukangan untuk Karang Taruna yang telah diberikan oleh pemerintah, hanya untuk kepentingan sesaat. Hal itu karena mereka terbiasa dengan pemberian bantuan makanan yang dikonsumsi habis beberapa hari dibandingkan memikirkan masa depan lebih jauh.

Keenam, kemiskinan struktural (*structural poverty*). Persoalan kemiskinan tidak hanya persoalan kultural, melainkan juga persoalan struktural, karena kemiskinan berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, undang-undang,

dan perlakuan terhadap warga negara, berkaitan dengan kesempatan yang merata terhadap hak mendapat pendidikan sama, sarana dan prasarana. Orang Papua mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak dibandingkan orang-orang di Pulau Jawa. Wajar jika orang-orang Papua, misalnya, kalah dalam persaingan merebut kesempatan kerja yang standarnya disamakan, sedangkan pendidikan antara keduanya masih timpang. Oleh karena itu, perlu kesetaraan (*equality*) dalam perlakuan terhadap semua warga negara. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, pernah mengemukakan teori keadilan distributif. Salah satu prinsip keadilan, menurutnya, adalah kesetaraan yang tidak memihak dalam memperoleh kesempatan (*fair equality of opportunity*). Keadilan adalah ketidakberpihakan kepada suatu kelompok tertentu.

Dalam al-Qur'an, ajaran tentang keadilan sangat ditekankan, seperti dinyatakan "Apa saja harta rampasan (*fai`*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, *supaya harta itu*

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. al-Hasyr:7). Amin Rais mungkin tidak bermaksud untuk berapologi, tapi hanya menyebutkan paralelitas, dengan menyatakan bahwa Islam mengajarkan "keadilan distributif" (*distributive justice*), yaitu bagaimana agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh anggota masyarakat, meski tidak berarti sama rata. Dengan ajaran ini, Islam menginginkan agar tidak ada masyarakat yang terlalu kaya, sementara anggota masyarakat yang lain terlalu miskin. Ungkapan "*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*" menunjukkan ajaran Islam tentang keadilan sosio-ekonomi. Islam mengakui adanya kepemilikan hak pribadi, tapi juga mengajarkan kepedulian kepada sesama. Atas dasar inilah, misalnya, diajarkan berbagai macam bentuk kedermawanan (*charity*), tidak hanya dalam bentuk zakat (wajib), melainkan juga sedekah (sunnat). Karena al-Qur'an menyatakan "Dalam harta-hartamu ada kewajiban yang telah ditentukan. Bagi orang yang minta-minta dan yang tidak mempunya".

"Urunan Kematian" atau "Urunan Kehidupan"?

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa umat Islam umum lebih peka dengan akheratisme, persoalan mati, dibandingkan dengan persoalan masa depan di dunia. Berjalan para pendaftar haji sunnat (haji kedua dan seterusnya) dan umrah di satu sisi, dan terbengkalainya agenda-agenda sosial, seperti pembangunan pesantren, lembaga sosial, pendidikan, keterbelakangan, dan rendahnya derajat kesehatan di sisi lain, menjadi indikasi kuat bahwa mereka lebih peka dengan urusan keselamatan di akherat. Di lingkungan kita, di tingkat RT dan RW, biasanya ada "urunan kematian", yaitu pengumpulan dana sosial untuk menyelenggarakan proses keagamaan menguburkan orang muslim yang meninggal, untuk membikin peti mati, memberi upah penggali liang lahat, memberi upah orang yang memandikan mayat, dan para petugas keagamaan, seperti pembaca talqin di kalangan masyarakat NU. Penjaminan sosial dari tingkat paling bawah itu, sebagaimana usul Noorhalis Majid (LK3), seharusnya ditindaklanjuti dengan memperluasnya ke "urunan kehidupan", seperti pengumpulan dana masyarakat yang diatur

secara lebih profesional untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, kebutuhan sandang, pangan, pengembangan simpan pinjam untuk usaha, dan sebagainya. Sebagian persoalan ini memang telah diambilalih oleh penyelenggara profesional seperti asuransi kesehatan dan KUD, tapi tentu saja dengan harga yang tidak semurah dan mekanisme semudah jika hal itu dikordinasi oleh masyarakat sendiri. Begitu juga, dana pinjaman untuk usaha memang telah disediakan oleh bank atau unit usaha swasta tertentu dengan iklan menggiurkan, tapi akan menjerat masyarakat dengan kapitalisme karena harus membayar bunga pinjam yang cukup besar. Di masyarakat perdesaan, sebenarnya sudah ada model sederhana yang sebenarnya bisa dikembangkan, seperti urunan untuk membeli alat-alat dapur, atau sekadar membeli gula untuk menyongsong bulan Ramadhan.

Akhirnya, mayoritas umat Islam ini akan menjadi berdaya jika potensi kuantitas tersebut dikelola dengan baik agar ekonominya lebih kuat, baik dengan pendekatan kultural maupun struktural. Saleh secara agama dan sosial, dan memiliki keberdayaan secara ekonomi adalah harapan yang dituju. □